

Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2008 Dalam Merevitalisasi Pasar Wlingi Kabupaten Blitar

Ajeng Putri Nur Islami

Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia

Universitas Airlangga

Email : ajengpni@gmail.com

Abstrak

Tujuan: Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional di Pasar Wlingi Kabupaten Blitar.

Desain/Metode: Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan serta permasalahan yang ada di konteks implementasi tersebut.

Temuan: Secara garis besar pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional khususnya Pasar Wlingi sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor pendukung yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program revitalisasi Pasar Wlingi yang pertama, membahas Content of policy yang ingin dijelaskan adalah bahwa perubahan yang diinginkan oleh pemerintah dalam merevitalisasi pasar tersebut untuk mewujudkan sinergi yang saling kuat antara pasar tradisional dengan pasar modern, standar dan sasaran dari program revitalisasi pasar Wlingi sudah cukup baik. Kedua, Context of Implementation dalam pelaksanaannya, program ini juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, lingkungan dan juga aktor yang terlibat seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Pengelola Pasar Wlingi, Pedagang, Masyarakat/Pembeli. Maka Program revitalisasi pada Pasar Wlingi akan berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Tipe Penelitian: Kajian empiris

Keywords : Revitalisasi Pasar Tradisional, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik

I. Pendahuluan

Kabupaten Blitar mempunyai 13 pasar tradisional, yang mempunyai andil pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka pemerintah berupaya untuk mempertahankan pasar tradisional dengan melalui program yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan yakni revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pasar tradisional diharapkan mampu meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan tetap mempertahankan kekhasan maupun keunggulan yang dimiliki pasar tradisional, sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Blitar maka pemerintah daerah harus memperbaiki sarana/prasarana perkotaan serta dengan memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha. Melihat bahwa peran pasar tradisional sebagai jantung perekonomian sebagian masyarakat, pemerintah menempuh upaya peningkatan daya saing pasar tradisional dengan cara meningkatkan citra pasar tradisional yang identik dengan lokasi perdagangan yang kumuh, becek, dan tidak higienis dengan cara revitalisasi pasar tradisional.

Untuk merevitalisasi pasar tradisional yang ada di Wlingi ini bukan hanya pemerintah Kabupaten Blitar yang berperan aktif sebagai motor penggerak yang bertugas menyadarkan pedagang untuk menjamin mutu barang dagangan yang pedagang jual, tetapi diperlukan juga kesadaran dari pedagang yang berjualan di dalam Pasar Wlingi. Dalam proses revitalisasi pasar tradisional adalah pembinaan dan pemberdayaan terhadap para pedagang pasar tradisional. Diantaranya adalah dukungan terhadap akses permodalan maupun pembinaan terkait dengan jenis dan kemasan produk sehingga bisa bersaing dengan produk yang dijual oleh pasar modern. Alhasil, pemerintah daerah mampu membatasi keberadaan pasar modern dengan cara memperkuat kualitas pasar tradisional itu sendiri.



Prinsip Revitalisasi Kementerian Perdagangan RI

(Sumber : ews.kemendag.go.id)

Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengembangkan pasar tradisional adalah dengan mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional (sarana bangunan; keamanan; kebersihan dan kelengkapan lainnya seperti musholla, tempat parkir) sehingga keberadaannya tetap terpelihara. Usaha Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sarana dan prasarana pasar tradisional sudah mulai tampak dengan banyaknya pasar tradisional yang direnovasi dan direvitalisasi, baik dari segi bangunan, penataan pedagang maupun sarana dan prasarananya. Kondisi semacam ini menggambarkan bahwa pasar tradisional di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Di balik beberapa kelemahan, pasar tradisional menyimpan peran penting bagi masyarakat luas yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pasar-pasar modern. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pembinaan pasar tradisional memerlukan upaya terintegrasi, mulai di tingkat kebijakan hingga di tingkat operasional. Setiap tingkat memerlukan bentuk-bentuk pembinaan yang saling terkait satu bidang dengan bidang lain. Sebagai contoh, pembinaan pasar tradisional beserta pedagang pasar merupakan kelanjutan dari kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2008 yang menyatakan tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern. Pembinaan di tingkat operasional diwujudkan dalam bentuk pembinaan manajemen pasar tradisional dan pedagang pasar serta pembinaan PKL dan lingkungannya, khususnya ketertiban keberadaan pasar modern seperti supermarket/minimarket yang jaraknya sudah ditentukan yang kurang lebih harus berjarak minimal 1 kilometer dari pasar tradisional agar tidak mematikan pasar tradisional itu sendiri. Keterkaitan dengan bidang-bidang lain inilah yang seringkali kurang diperhatikan, sehingga penanganan masalah bersifat parsial, hasilnya kurang maksimal karena kurang dapat menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

II. Kajian Teori

Merilee S. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, bahwasanya proses tersebut baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan kemudian program kegiatan telah tersusun, dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran yang dituju. Implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Dalam variabel pertama yang disebutkan oleh Merilee S. Grindle, isi kebijakan (*content of policy*) disebutkan ada enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan.

- (1) Kepentingan kelompok sasaran, dalam hal ini sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- (2) Jenis Manfaat, apa manfaat yang diterima oleh *target groups* dengan adanya kebijakan tersebut.
- (3) Derajat perubahan yang diinginkan, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit

- diimplementasikan daripada program yang sekedar memberika bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. Indikator keempat
- (4) Letak pengambilan keputusan, hal ini berarti apakah suatu kebijakan dalam proses perencanaan ataupun perumusan masalah kebijakan sudah melibatkan seluruh *stakeholders* terkait dengan bidang garapan kebijakan tersebut.
 - (5) Pelaksanaan program, dalam pelaksanaan kebijakan tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut apakah sesuai dengan tujuan atau belum. Tentu saja dalam hal ini juga terkait dengan apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya secara rinci.
 - (6) Sumberdaya yang dilibatkan, melihat apakah kebijakan tersebut didukung dengan sumberdaya yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.

Sedangkan 'lingkungan implementasi (*context of implementation*)' disebutkan ada 3 indikator yang berperan penting dalam mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

- (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, melihat seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, melihat bagaimana karakter dari institusi serta rezim yang sedang berkuasa.
- (3) Kepatuhan dan daya tanggap, melihat seberapa besar tingkat kepatuhan dan responsivitas *target groups*.

Menurut Grindle, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi implementasi kebijakan, kemudian faktor-faktor implementasi kebijakan, mendeskripsikan dan mengevaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli dan peran pemerintah. Terkait dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, dalam kenyataannya Implementasi Kebijakan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2008. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Paguyupan Pedagang Pasar Tradisional, serta lokasi Pasar Wlingi bahwasanya wawancara kualitatif berperan penting dalam riset politik, wawancara yang baik harus berpedoman pada beberapa prinsip yang relevan dengan survei yang baik (seperti perencanaan, keterwakilan sampel, focus pada topic) tetapi ada pula alasan praktis dan strategis dalam hal wawancara merupakan cara yang valid.

IV. Hasil dan Pembahasan:

A. Isi kebijakan (*Content of Policy*) :

1. Kepentingan Kelompok Sasaran (*Interest Affected*)

Dibuatnya Perda Nomor 03 Tahun 2008 ini sebagai respon sekaligus bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan pasar dan toko modern yang semakin menjamur. Hal tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Standar dan sasaran dari program revitalisasi pasar Wlingi sudah cukup baik, karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Bagian Pengelolaan Pasar telah memiliki indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja pelaksanaan program revitalisasi pasar yang diarahkan oleh Kementerian Perdagangan. Kinerja dari Pemerintah sendiri

sudah berjalan cukup baik ditunjukkan dari 13 pasar yang ada di Kabupaten Blitar, Pasar Wlingi termasuk salah satu pasar yang sudah mulai di revitalisasi kemudian disusul oleh Pasar Kanigoro. Ada sebagian pasar tradisional yang berada di Kabupaten belum direvitalisasi. Aktivitas Komunikasi, Koordinasi dan Sosialisasi antar pihak yang terkait dengan kebijakan revitalisasi menjadi hal yang sangat vital/penting. Terlebih lagi komunikasi antara pemerintah sebagai implementator dengan obyek kebijakan yaitu masyarakat.

2. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Suatu program dibentuk dengan memiliki tujuan tertentu. Dalam masalah ini, pedagang yang berada di Pasar Wlingi cenderung memilih kondisi dimana Pasar Wlingi yang terata rapi dan mempunyai banyak fasilitas yang lengkap dan memadai dibandingkan dengan kondisi Pasar Wlingi sebelum direvitalisasi. Tetapi disini lain setelah revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar berdampak negatif terhadap pendapatan pedagang sebab dampak tersebut dirasakan oleh pedagang.

3. Derajat Perubahan (*Extent of Change Envision*)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Dalam kasus Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan toko Modern ini derajat perubahan yang diinginkan baik bagi pemerintah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pedagang dan Masyarakat/Pembeli dalam segi merevitalisasi Pasar Wlingi adalah agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan sendiri, dan menjadi ikon kota Wlingi. Pernyataan tersebut sebanding dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 pada Bab IV Pasal 6 ayat (7).

4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Dalam hal merevitalisasi Pasar Wlingi, ketika Kementerian Perdagangan memiliki program Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan toko Modern yang ditujukan kepada seluruh pasar tradisional yang ada di Indonesia dan setiap bagian provinsi menetapkan hal tersebut sebagai Peraturan daerah yang mana Peraturan Daerah tersebut nantinya akan terealisasi dengan semestinya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa letak pengambilan keputusan dari kebijakan ini berada pada kelompok yang mewakili atas nama pedagang kemudian dibantu oleh DPRD Kabupaten Blitar. Yang menjadi pembuat kebijakan dalam hal ini adalah perwakilan pedagang Pasar Wlingi yang diwakili oleh Paguyuban Pasar Wlingi. Sedangkan DPRD Kabupaten Blitar di Komisi II ini hanya sebagai pengesah untuk dibuat kebijakan ini. Komunikasi yang terjalin antar aparat pelaksana dan pedagang sudah berjalan dengan baik dalam mendukung keberhasilan program revitalisasi pasar tradisional. kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai *leading sector* dalam membuat kebijakan selalu berupaya berkoordinasi dengan kantor Pengelola pasar Wlingi dan Paguyuban Pedagang Pasar Wlingi untuk turut ikut terlibat.

5. Pelaksana Program (*Program Implementer*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau tertata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Yang menjadi pelaksana kebijakan ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai *leading sector*, Paguyuban Pedagang Pasar Wlingi, Pedagang Pasar Wlingi, dan juga Masyarakat. Tanpa adanya elemen-elemen tersebut maka dapat dipastikan bahwa suatu implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Agenda Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menempuh upaya revitalisasi terhadap Pasar Wlingi untuk meningkatkan daya saing dengan bermunculannya pasar-pasar yang bertaraf modern. Pemerintah Kabupaten Blitar selaku implementator kebijakan setidaknya akan menghabiskan anggaran yang sudah disiapkan, tidak hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Blitar, tetapi juga berasal dari Pemerintah Pusat. Pasar Wlingi pada tahun 2010 ditargetkan akan dibangun menjadi dua lantai kemudian pada tahun 2016 Pasar Wlingi akan bertambah lebar sebab tempat eks. Pasar Hewan akan dijadikan Pasar Pagi untuk Pedagang berjualan sayur, buah yang nantinya oprasional Pasar Pagi tersebut mulai dari dini hari hingga subuh, dan berlanjut untuk operasional Pasar Induk pada Bagian Pasar Wlingi pada jam 6 pagi hingga sore.

6. Sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*)

Sebuah program semestinya di dukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Salah satunya sumber daya finansial juga merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi suatu program. Dana atau sumber financial tersebut merupakan penting untuk mengimplementasikan suatu rencana. Besaran dana yang disiapkan sangat mempengaruhi jalannya suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Perencanaan dana ini bertujuan agar dalam proses pengimplementasiannya tidak memakan biaya lebih dari yang sudah ditetapkan. Untuk anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Blitar untuk merevitalisasi Pasar Wlingi paada tahun pertama yakni tahun 2005, kemudian pada tahun 2010 anggrannya 874 juta dengan bantuan konsultan perencanaan oleh CV.Trisula Konsulindo. Pembangunan Pasar Wlingi dilaksanakan secara bertahap dengan target peren canaan tahun 2010 kemudian dilanjutkan lagi pada tahun anggaran 2013. Dana untuk merevitalisasi juga berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat APBD Provinsi.

B. Konteks Implementasi

(*Context of implementation*) :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*Strategy of Actor Involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Aktor yang terlibat dalam Revitalisasi Pasar Wlingi ini meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kantor pengelola Pasar Wlingi, Pedagang Pasar, Masyarakat/Pembeli. Saat ini aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Perda merasakan bahwa tidak ada lagi ada batasan tanggung jawab dari satu instansi saja atau dapat dikatakan permasalahan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan toko Modern kini tidak hanya menjadi masalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja tetapi seluruh SKPD pun telah memiliki tanggung jawab yang sama untuk ikut membantu dalam masalah Revitalisasi Pasar Wlingi yang ada di Kabupaten Blitar gunanya tentu untuk memajukan Pasar Tradisional.

Untuk memajukan Pasar Tradisional khususnya Pasar Wlingi setelah direvitalisasi adalah dengan cara memberikan informasi yang positif baik bagi masyarakat luas agar tidak memberikan stigma dan citra buruk kepada pasar tradisional. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan Pemerintah baik kepada pedagang dan masyarakat sekitar yang terkena imbas relokasi, dilaksanakan secara berulang-ulang dan bertahap hingga dirasa proses penyampaian informasi dirasa telah berhasil dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memberikan pemahaman dari masing-masing pihak. Media sosialisasi yang dipergunakan adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Wlingi yang berisi dialog dan *sharing* oleh Kantor Pasar Wlingi dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagian pengelola pasar terkait juga pemenang tender pembangunan.

2. Karakteristik lembaga dan Penguasa (*Institution and Regime Characteristic*)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Fokus terhadap arah dan tujuan kebijakan akan membawa pengaruh pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab dan tugas diantara pihak-pihak yang terlibat. Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai informan dari unsur Pemerintah diperoleh hasil mengenai tingkat pemahaman pemerintah terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Wlingi, bahwa yang mendasari perumusan kebijakan revitalisasi yaitu untuk meningkatkan daya saing Pasar Wlingi seiring dengan perkembangan pasar di Kabupaten Blitar maupun Kota Blitar yang diwarnai dengan masuknya pasar modern seperti minimarket memang harus sudah dibatasi guna memajukan pasar tradisional. Selain itu letak Pasar Wlingi yang strategis di kawasan pusat kecamatan Wlingi yang mana kecamatan Wlingi berada di kawasan *heritage tourism* serta kawasannya hampir seperti pusat Kota Blitar yang menuntut adanya sinergisitas dengan rencana tata ruang kota sehingga kondisi Pasar Wlingi harus ditingkatkan kualitas fisik dan non-fisiknya.

3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Aparat pelaksana sudah melaksanakan revitalisasi sudah cukup baik, dengan menempatkan pegawai yang ada di kantor pengelola pasar yang

paham mengenai program bagaimana revitalisasi pasar berjalan, serta memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup. Namun tetap diperlukan peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat agar setiap pegawai yang bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan program revitalisasi pasar selanjutnya benar-benar mempunyai kompetensi yang baik. Kerjasama yang baik juga ditunjukkan dari badan-badan yang lain baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya bagian pengelola Pasar Wlingi maupun swasta yang mendukung pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional.

V. Penutup

Revitalisasi diartikan sebagai proses untuk penguatan kembali sesuatu yang sebelumnya pernah memiliki pengaruh dan peran yang signifikan namun telah mengalami penurunan/degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan dari aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan. Pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan revitalisasi terhadap Pasar Wlingi ini dilaksanakan melalui upaya yang mencakup pembangunan kembali bangunan fisik Pasar Wlingi, dimana nantinya bangunan Pasar Wlingi yang lama akan direnovasi dan diganti dengan bangunan baru yang lebih bagus dan lebih layak dari sebelumnya.

Dengan konsep yang sudah direnovasi sehingga fungsi pasar lebih representatif dalam menunjang transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, dari aspek ekonomi akan lebih meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten lewat retribusi pasar dan juga pemasukan pasar meningkat setelah adanya revitalisasi pasar, tetapi pada kenyataannya bertolak belakang dengan pendapatan yang diperoleh oleh pedagang pasar, pedagang dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwasanya setelah direvitalisasi bukannya pendapatan pedagang meningkat melainkan pendapatan yang mereka peroleh semakin menurun. Jika ditinjau dari aspek sosial, dengan bangunan yang baru dengan konsep seperti itu, lebih mendorong masyarakat untuk memilih berkunjung dan berbelanja di Pasar Wlingi yang mana Pasar Wlingi merupakan Pasar Tradisional terbesar di daerah Blitar bagian Timur.

Fokus terhadap arah dan tujuan kebijakan membawa pengaruh pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab dan tugas diantara pihak-pihak yang terlibat. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak yakni kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai informan dari unsur Pemerintah diperoleh hasil mengenai tingkat pemahaman pemerintah terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Wlingi, bahwa yang mendasari perumusan kebijakan revitalisasi yaitu untuk meningkatkan daya saing Pasar Wlingi seiring dengan perkembangan pasar di Kabupaten Blitar maupun Kota Blitar yang diwarnai dengan masuknya pasar modern seperti minimarket. Selain itu letak Pasar Wlingi yang strategis di kawasan pusat kecamatan Wlingi yang mana kecamatan Wlingi berada di kawasan *heritage tourism* serta kewasannya hampir seperti pusat Kota Blitar yang menuntut adanya sinergisitas dengan rencana tata ruang kota yang identik lebih modern sehingga keberadaan Pasar Wlingi berjarak kurang lebih 1 km dengan Pasar modern/minimarket dengan tujuan tidak mematikan pasar tradisional.

Aktivitas sosialisasi yang dilakukan Pemerintah baik kepada pedagang dan masyarakat sekitar yang terkena imbas relokasi, dilaksanakan secara berulang-ulang dan bertahap hingga dirasa proses penyampaian informasi dirasa telah berhasil dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memberikan pemahaman dari masing-masing pihak. Media sosialisasi yang dipergunakan adalah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mengundang perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Wlingi yang berisi dialog dan *sharing* oleh Kantor Pasar Wlingi dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagian pengelola pasar terkait juga pemenang tender pembangunan. Proses penyampaian informasi melalui sosialisasi ini bisa dikatakan berhasil, jika dilihat dari hasil *sharing* tersebut tidak adanya perlawanan dari pihak pedagang dimana belum pernah sekalipun terjadi demonstrasi seperti halnya yang marak terjadi di tempat lain. Keberhasilan ini menjadi point tersendiri bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar bahwa tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan, hanya dengan mengambil hati dengan cara berdiskusi dan menumbuhkan kesadaran pada diri pedagang.

Dalam kebijakan pemerintah dalam revitalisasi pasar tradisional agar keberadaannya dapat eksis dan bertahan lama ditengah-tengah masyarakat. Implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif.

Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- B. Miles, *Penelitian kualitatif*, Prenada media Group, Jakarta, 2010
- Grindle, M. S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton; University Press. 1980
- Lofland, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 1984
- Nugroho, Heru, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2001
- Nugroho, Heru. *Uang, Renternir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset. 2001
- Steger, B. Manfred. 2005, *Globalisme (Bangkitnya Ideologi Pasar)*. Yogyakarta; Penerbit Lafadl.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008
- Buku Pasar Rakyat – Badan Standardisasi Nasional 2014
- Data Protokol Pemetaan Pasar Tradisional Tahun 2014
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- Perencanaan Master Plan Pasar Wlingi, Unit Usaha dan kerjasama Bidang Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya. Malang, 2013
- Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2012 Tentang *Isu, Tujuan, dan Kriteria Perancangan Pasar Tradisional*: Ekomadyo, Agus S. *Isu, Tujuan, dan Kriteria Perancangan pasar Tradisional*. Temu Ilmiah IPLBI 2012.
- Maulana, Novan. Studi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang 2012.
- Sudjono, Raymond. Kesesuaian Revitalisasi pasar Tradisional Menjadi Pusat Perbelanjaan. E-Journal Graduate Unpar, 2014